



## Indonesia sebagai Negara Maritim: Tinjauan Historis Perkembangan Pelayaran Nusantara

Yohanis Kristianus Tampani<sup>1</sup>, Augusta De Jesus Magalhaes<sup>2</sup>, Delfiana Klaran Nahak<sup>3\*</sup>, Efantri Manhitu<sup>4</sup>, Maria Yulinda Luruk<sup>5</sup>, Yanuarius Lutan<sup>6</sup>, Angela Abi<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup>Pendidikan Sejarah, STKIP Sinar Pancasila, Indonesia

\*Korespondensi Penulis: [dhedhenahak29@gmail.com](mailto:dhedhenahak29@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to describe and analyze the historical development of maritime navigation in the Indonesian archipelago (Nusantara) and its relevance to Indonesia's identity as a maritime nation. The study employs a literature review method by collecting and analyzing data from various primary and secondary sources. The results indicate that Indonesia has a long and rich maritime history, as evidenced by the dominance of maritime kingdoms such as Sriwijaya and Majapahit, which controlled major sea trade routes and built extensive international networks. The development of Nusantara navigation was also influenced by the introduction of various maritime technologies, the spread of religion through sea routes, and ultimately the impact of European colonialism which disrupted traditional maritime trade systems. In the modern era, Indonesia's maritime identity has been revitalized through the Sea Toll program and the Global Maritime Fulcrum vision. This study concludes that an understanding of the historical development of Nusantara navigation is essential as a foundation for building a strong, sovereign, and prosperous maritime Indonesia.*

**Keywords:** Archipelago; Indonesia; Maritime History; Maritime Nation; Nusantara Navigation.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis perkembangan historis pelayaran di kepulauan Nusantara serta relevansinya terhadap identitas Indonesia sebagai negara maritim. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejarah maritim yang panjang dan kaya, yang tercermin dari dominasi kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit yang menguasai jalur perdagangan laut utama serta membangun jaringan perdagangan internasional yang luas di kawasan Asia hingga mancanegara. Perkembangan pelayaran di Nusantara juga dipengaruhi oleh masuknya teknologi maritim dari berbagai bangsa, proses penyebaran agama melalui jalur laut, serta dampak kolonialisme Eropa yang mengubah struktur perdagangan maritim tradisional secara signifikan. Pada era modern, identitas maritim Indonesia kembali direvitalisasi melalui berbagai kebijakan strategis pemerintah, seperti program Tol Laut dan visi Poros Maritim Dunia sebagai upaya memperkuat konektivitas antarpulau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam terhadap sejarah pelayaran Nusantara sangat penting sebagai landasan dalam memperkuat identitas maritim Indonesia menuju negara yang berdaulat, maju, dan sejahtera di bidang kelautan.

**Kata Kunci:** Indonesia; Kepulauan Nusantara; Negara Maritim; Pelayaran Nusantara; Sejarah Maritim.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia secara alamiah sebagai negara maritim yang kehidupan sosial, ekonomi, dan politiknya selalu terkait erat dengan laut. Sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang bangsa Indonesia telah mengarungi lautan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, membangun tradisi pelayaran yang mengagumkan dan meninggalkan warisan budaya maritim yang kaya bagi generasi masa kini (Widyatantri, 2025).

Dalam lintasan sejarahnya, kepulauan Nusantara pernah menjadi tempat berdirinya kerajaan-kerajaan maritim besar yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 masehi berhasil menguasai jalur perdagangan

di Selat Malaka dan menjadi pusat pendidikan Buddha internasional. Sementara Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 berhasil membangun kekuasaan atas sebagian besar kepulauan Nusantara melalui kekuatan armada lautnya yang tangguh (Reni & Mokodompit, 2024). Kejayaan kerajaan-kerajaan maritim tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan dan tradisi pelayaran yang mengakar kuat dalam peradabannya.

Namun, masa kejayaan pelayaran Nusantara mengalami kemunduran seiring datangnya bangsa-bangsa Eropa yang secara bertahap mengambil alih kendali atas jalur perdagangan maritim. Penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad tidak hanya merampas kekayaan alam Nusantara, tetapi juga melemahkan tradisi dan sistem pelayaran lokal yang telah terbangun sejak lama. Dampak kolonialisme ini masih dapat dirasakan dalam perkembangan sektor maritim Indonesia pasca-kemerdekaan yang memerlukan kerja keras untuk bangkit kembali (Hidayat et al., 2024).

Pada era modern, pemerintah Indonesia telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya potensi maritim bangsa dengan mencanangkan berbagai kebijakan strategis. Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dicanangkan sejak tahun 2014 merupakan bukti komitmen untuk menjadikan laut sebagai kekuatan utama pembangunan nasional. Program Tol Laut yang dirancang untuk memperlancar konektivitas antar pulau juga mencerminkan upaya serius dalam memanfaatkan potensi geografis maritim Indonesia (Putra, 2025). Oleh karena itu, memahami perjalanan historis pelayaran Nusantara menjadi sangat penting sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan maritim yang tepat dan berwawasan kebangsaan.

Penelitian studi pustaka ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif perkembangan historis pelayaran Nusantara dari era prasejarah hingga era modern, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Dengan memahami akar historis identitas maritim Indonesia, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kesadaran maritim masyarakat dan mendukung upaya pembangunan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan sejahtera.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian tentang identitas maritim Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Perkembangan pelayaran Nusantara erat kaitannya dengan sejarah panjang interaksi antarpulau dan hubungan perdagangan laut yang sudah berlangsung sejak era kerajaan-kerajaan maritim awal (Widyatantri, 2025). Kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan telah terbukti jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa tiba di perairan Nusantara.

Kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit merupakan bukti nyata dari kemampuan bangsa Nusantara dalam mengelola kekuatan laut. Sriwijaya dikenal sebagai simbol kerajaan maritim di Nusantara karena lokasi wilayah lautnya yang sangat strategis sebagai jalur utama bagi para pedagang internasional yang berlayar dari India ke Cina (Syafarudin & Mursidi, 2023). Dominasi Sriwijaya atas Selat Malaka memberikan kendali penuh terhadap arus perdagangan antar benua yang menjadi sumber kemakmuran bagi kerajaan tersebut.

Sementara itu, kajian tentang dampak kolonialisme terhadap sistem maritim Nusantara menunjukkan bahwa kedatangan bangsa Eropa telah mengubah secara fundamental tatanan perdagangan dan pelayaran yang telah terbangun selama berabad-abad. Kolonialisme memperkenalkan sistem eksploitasi yang merugikan masyarakat pribumi, termasuk monopoli perdagangan laut yang menghancurkan jaringan niaga lokal (Hidayat et al., 2024). Warisan kolonialisme inilah yang kemudian menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam membangun kembali kejayaan maritimnya pasca kemerdekaan.

Dalam konteks modern, konsep Poros Maritim Dunia dan berbagai kebijakan kelautan Indonesia telah menarik perhatian para peneliti internasional. Studi terbaru menunjukkan bahwa sejarah maritim Asia Tenggara terus memengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan keamanan regional, termasuk dalam isu diplomasi maritim, tata kelola laut, dan identitas regional (Putra, 2025; Suaimi, 2023). Dengan demikian, kajian historis pelayaran Nusantara tidak hanya relevan bagi pemahaman masa lalu, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi pengambilan kebijakan masa kini dan masa depan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data yang sudah ada dalam bentuk literatur terkait dengan topik penelitian. Menurut Magdalena, dkk (2021), metode studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan sumber-sumber bacaan seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, meliputi buku-buku sejarah maritim Indonesia, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan pemerintah terkait kebijakan kelautan, serta dokumen-dokumen historis yang berkaitan dengan perkembangan pelayaran Nusantara. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan kredibilitas dan relevansi sumber. Analisis data dilakukan secara

kualitatif dengan pendekatan historis-deskriptif untuk memahami kronologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pelayaran Nusantara dalam perspektif historis yang komprehensif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Tradisi Pelayaran Nusantara pada Era Prasejarah dan Klasik**

Tradisi pelayaran bangsa Nusantara telah ada jauh sebelum munculnya kerajaan-kerajaan besar di kepulauan ini. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah mampu mengarungi lautan menggunakan perahu-perahu sederhana sejak ribuan tahun yang lalu. Kemampuan berlayar ini tidak hanya digunakan untuk mencari sumber penghidupan dari laut, tetapi juga untuk menjalin hubungan antarpulau dan melakukan migrasi ke berbagai wilayah kepulauan. Tradisi pelayaran ini menjadi fondasi bagi berkembangnya peradaban maritim Nusantara yang kemudian mencapai puncak kejayaannya pada era kerajaan-kerajaan klasik.

Pada era klasik, kemampuan pelayaran Nusantara mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang menempatkan kekuatan laut sebagai basis kekuasaannya. Teknologi pembuatan kapal semakin berkembang, navigasi semakin canggih, dan jaringan perdagangan antarpulau semakin meluas. Para pelaut Nusantara dikenal sebagai pelaut-pelaut ulung yang mampu membaca tanda-tanda alam untuk keperluan navigasi, seperti bintang, arus laut, angin, dan perilaku binatang laut. Keahlian navigasi tradisional ini yang kemudian menjadi keunggulan kompetitif bangsa Nusantara dalam persaingan perdagangan maritim di kawasan Asia Tenggara.

##### **Kejayaan Kerajaan-Kerajaan Maritim Nusantara**

Kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 hingga ke-13 M) merupakan kekuatan maritim pertama yang berhasil membangun dominasi atas jalur perdagangan internasional di Asia Tenggara. Sriwijaya dikenal sebagai simbol kerajaan maritim di Nusantara karena lokasi wilayah lautnya sangat strategis sebagai jalur utama bagi para pedagang internasional yang berlayar dari India ke Cina. Para pedagang tersebut singgah di pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Sriwijaya untuk menjalankan kegiatan perdagangan dan aktivitas lainnya. Selain menjadi pusat perdagangan, Sriwijaya juga berkembang menjadi pusat pendidikan agama Buddha yang menarik pelajar dari berbagai penjuru Asia.

Keberhasilan Sriwijaya dalam membangun kekuasaan maritim tidak lepas dari kemampuannya mengendalikan Selat Malaka, yaitu jalur pelayaran tersempit yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Dengan menguasai selat strategis

ini, Sriwijaya mampu memungut pajak dari setiap kapal dagang yang melintas, sehingga menghasilkan pendapatan yang luar biasa besar bagi kerajaan. Selain itu, Sriwijaya juga membangun armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan jalur perdagangan dan menghalau bajak laut yang meresahkan para pedagang (Syafarudin & Mursidi, 2023).

Setelah memudarnya kekuasaan Sriwijaya, tampuk kepemimpinan maritim Nusantara diambil alih oleh Kerajaan Majapahit yang berbasis di Jawa Timur. Pada abad ke-14, di bawah kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit berhasil memperluas kekuasaannya atas sebagian besar kepulauan Nusantara melalui kekuatan armadanya. Wilayah kekuasaan Majapahit mencakup Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan semenanjung Melayu dan sebagian wilayah Filipina. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada mencerminkan ambisi besar Majapahit untuk menyatukan Nusantara di bawah satu kekuasaan melalui jalur laut (Reni & Mokodompit, 2024).

Kerajaan Demak kemudian mengambil peran menguasai jalur perdagangan maritim setelah kemunduran Majapahit. Kerajaan Demak memiliki letak geografis yang sangat mendukung baik di bidang perdagangan maupun agraris karena berlokasi di tepi sungai di antara Pegunungan Muria dan Jawa yang dijadikan pusat transaksi bagi para pedagang muslim dari Arab, Cina, dan India. Masa kepemimpinan Pati Unus sangat giat dalam memperkuat kedudukan Demak sebagai kerajaan Islam maritim terbesar di Nusantara dengan menjalin kerja sama dengan daerah-daerah di pantai utara Jawa yang menganut agama Islam.

### **Dampak Kolonialisme terhadap Pelayaran Nusantara**

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa, khususnya Portugis dan kemudian Belanda pada abad ke-15 hingga ke-17, membawa perubahan mendasar terhadap sistem pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Tujuan utama kedatangan mereka adalah menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan, namun dampaknya jauh lebih besar dari sekadar persaingan dagang biasa. Secara bertahap, bangsa-bangsa Eropa berhasil menggeser kekuatan maritim lokal melalui kombinasi kekuatan militer, diplomasi, dan perjanjian-perjanjian yang sering kali menguntungkan pihak penjajah.

Belanda melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) berhasil membangun monopoli perdagangan yang sangat merugikan pelaut dan pedagang pribumi. Semenjak Nusantara dikuasai bangsa Eropa, perlahan-lahan para penguasa lokal diikat dengan perjanjian yang secara tidak sadar membuat Belanda dapat menguasai daerah pantai yang semula menjadi kekuatan perdagangan maritim. Sistem monopoli ini menghancurkan jaringan perdagangan tradisional antar pulau yang telah terbangun selama berabad-abad, dan memaksa pelaut-pelaut Nusantara untuk beroperasi dalam kerangka yang ditentukan oleh kepentingan kolonial.

Dampak jangka panjang kolonialisme terhadap pelayaran Nusantara sangat signifikan. Pengetahuan dan teknologi maritim tradisional yang diwariskan turun-temurun mengalami degradasi karena tidak mendapat ruang untuk berkembang dalam sistem kolonial. Selain itu, pembangunan infrastruktur pelabuhan dan jalur perdagangan pada masa kolonial lebih diarahkan untuk melayani kepentingan eksportasi kekayaan alam Nusantara ke Eropa, bukan untuk membangun konektivitas antarpulau yang kuat. Warisan buruk inilah yang kemudian menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam membangun sistem pelayaran nasional yang mandiri pasca kemerdekaan (Hidayat et al., 2024).

### **Kebangkitan Maritim Indonesia di Era Modern**

Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali identitas dan kekuatan maritimnya. Kesadaran akan pentingnya potensi laut bagi pembangunan nasional terus tumbuh dari waktu ke waktu. Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum maritim Indonesia, karena menegaskan bahwa perairan di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan Indonesia. Deklarasi ini kemudian menjadi dasar bagi pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan (*archipelagic state*) yang akhirnya diakomodasi dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982.

Pada era reformasi dan seterusnya, kebijakan pembangunan maritim Indonesia semakin mendapat perhatian serius. Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dicanangkan pemerintah mencakup lima pilar utama, yaitu: pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, pengembangan infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Visi besar ini mencerminkan tekad untuk mengembalikan Indonesia pada kejayaan maritimnya di masa lampau sekaligus menghadapi tantangan global di bidang kelautan (Putra, 2025).

Program Tol Laut yang diluncurkan pemerintah merupakan salah satu implementasi konkret dari visi Poros Maritim Dunia. Program ini bertujuan untuk membangun konektivitas antarpulau melalui pengembangan jalur pelayaran reguler yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan terluar. Dengan konektivitas laut yang baik, diharapkan kesenjangan harga kebutuhan pokok antara Jawa dan wilayah-wilayah terpencil dapat dikurangi, sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Program ini juga diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat dan tradisi pelayaran Nusantara yang sempat meredup akibat panjangnya masa kolonialisme (Widyatantri, 2025).

Revitalisasi identitas maritim Indonesia juga tercermin dalam berbagai upaya pelestarian dan pengembangan budaya bahari. Festival perahu tradisional, program pemberdayaan nelayan, penelitian arkeologi maritim, dan pendidikan kemaritiman di berbagai jenjang pendidikan merupakan sebagian dari upaya-upaya tersebut. Warisan kemaritiman leluhur bangsa Indonesia, seperti perahu Pinisi dari Sulawesi Selatan yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia, menjadi simbol kebanggaan dan pengingat akan kejayaan maritim Nusantara di masa lalu yang harus terus dijaga dan dikembangkan (Kambhampati, 2025).

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki sejarah pelayaran yang sangat panjang dan kaya, yang berakar jauh sebelum munculnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Tradisi maritim yang kuat ini mencapai puncaknya pada era kejayaan kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Demak, yang berhasil membangun dominasi atas jalur perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan tersebut tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi yang disegani, tetapi juga menjadi pusat penyebaran budaya dan agama yang berpengaruh di kawasan.

Masa kolonialisme Eropa yang berlangsung selama berabad-abad memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap sistem pelayaran dan perdagangan tradisional Nusantara. Monopoli perdagangan yang diterapkan oleh kekuatan kolonial secara sistematis menghancurkan jaringan niaga antarpulau yang telah terbangun lama, dan mewarisi ketimpangan struktural yang harus dihadapi Indonesia pasca kemerdekaan. Namun demikian, semangat bahari bangsa Indonesia tidak pernah padam, dan berbagai upaya revitalisasi identitas maritim terus dilakukan sejak kemerdekaan hingga kini.

Pada era modern, visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan implementasinya melalui program-program strategis seperti Tol Laut mencerminkan kesadaran mendalam akan pentingnya potensi maritim bagi kemajuan bangsa. Pemahaman yang komprehensif atas perkembangan historis pelayaran Nusantara menjadi sangat penting sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan maritim yang tepat, berwawasan kebangsaan, dan mampu menjawab tantangan global di bidang kelautan. Dengan belajar dari sejarah, Indonesia diharapkan dapat membangun kembali kejayaan maritimnya dan mewujudkan cita-cita sebagai negara maritim yang kuat, berdaulat, dan sejahtera demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, T. (2018). *Indonesia: Towards democracy*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Andaya, B. W., & Andaya, L. Y. (2015). *A history of early modern Southeast Asia, 1400–1830*. Cambridge University Press.
- Bertrand, J. (2024). *State and sub-state nationalism in Southeast Asia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009583046>
- Hall, K. R. (2011). *A history of early Southeast Asia: Maritime trade and societal development*. Rowman & Littlefield.
- Hidayat, A. A., Arsyad, M. F., Nurcahya, Y., & Syah, M. K. T. (2024). Masa kolonialisme kawasan Asia Tenggara. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 126–138. <https://doi.org/10.59757/sharia.v1i2.39>
- Kambhampati, H. B. (2025). Kalinga and Southeast Asia civilizational connections: Maritime heritage and regional cooperation. *Times of India Conference Report*.
- Magdalena, A., et al. (2021). *Metode penelitian: Untuk penulisan laporan penelitian dalam ilmu pendidikan agama Islam*. Penerbit Buku Literasiologi.
- Putra, B. A. (2025). Making waves: Marine research vessels in China and Vietnam's overlapping maritime zones. *Frontiers in Political Science*, 7, 1670797. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1670797>
- Reid, A. (1988). *Southeast Asia in the age of commerce, 1450–1680*. Yale University Press.
- Reni, W. O., & Mokodompit, E. A. (2024). Sejarah kerajaan maritim. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 119–127.
- Suaimi, M. S. bin M. (2023). Maritime security in Southeast Asia: The role of information sharing operation centres. *Indonesian Maritime Journal*.
- Syafarudin, N., & Mursidi, A. (2023). Local maritime kingdom in the Nusantara archipelago (Study of high school social studies history textbook). *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 7(2), 1–5. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3164>
- Tampani, Y. K., et al. (2026). Dari Kerajaan Maritim ke Negara Bangsa: Transformasi politik dan sosial Asia Tenggara dalam lintasan sejarah. *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 4(1), 68–76. <https://journal.appisi.or.id/index.php/sosial/article/view/1503>
- Tarling, N. (2001). *The Cambridge history of Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Widyatantri, T. D. (2025). Perkembangan maritim Nusantara yang menjadi awal dari kegiatan perdagangan di wilayah Banten. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(2), 326–334.
- Wiharyanto, A. K. (2012). *Sejarah Asia Tenggara: Dari awal tumbuhnya nasionalisme sampai terbangunnya kerja sama ASEAN*. Universitas Sanata Dharma Press.